

## Analisis Kinerja Pengelolaan Hutan Pada Balai KPH Toffo Pajo Soromandi

Fitrianingsih<sup>1</sup>, Andi Chairil Ichan<sup>2</sup>, Niechi Valentino<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Mataram, Jl. Majapahit No.62, Mataram, Indonesia

\*Corresponding Author e-mail: [andi.foresta@unram.ac.id](mailto:andi.foresta@unram.ac.id)

*Received: August 2025; Revised: September 2025; Published: October 2025*

### Abstrak

Hutan merupakan ekosistem penting yang didominasi oleh pepohonan dan memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Namun, berbagai permasalahan seperti alih fungsi lahan, perambahan, dan pertambangan ilegal menyebabkan kerusakan hutan, termasuk di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah membentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Toffo Pajo soromandi sebagai unit pengelola hutan di tingkat tapak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja KPH Toffo Pajo Soromandi dalam pengelolaan hutan lestari. Penelitian dilakukan pada Mei-Juni menggunakan metode deskriptif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Analisis dilakukan menggunakan pendekatan indeks kinerja berdasarkan 13 kriteria yang dapat mendefinisikan aspek aspek penting yang harus di capai dalam penelitian yaitu 1. Kriteria kelembagaan pengelolaan hutan 2. Tata hutan dan rencana pengelolaan hutan 3. Pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan 4. Perlindungan hutan dan konservasi alam 5. Rehabilitasi dan reklamasi hutan 6. Pemberdayaan 7. Peran serta masyarakat 8. Kerjasama 9. Monitoring dan evaluasi 10. Sistem informasi kehutanan 11. Pembinaan dan pengawasan 12. Pendanaan 13. Sarana dan prasarana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai indeks kinerja keseluruhan adalah 2,14, dikategorikan sedang. Kriteria dengan skor tertinggi adalah Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (2,85), sedangkan skor terendah terdapat pada Kerjasama (1,00) selain itu dari hasil analisis data dan temuan di lapangan di temukan kriteria kelembagaan pengelolaan hutan dengan skor sebesar 2,54 menjadi salah satu kriteria yang cukup berperan penting dalam kinerja penegelolaan hutan Kategori ini dapat menunjukkan bahwa fondasi kelembagaan, seperti struktur organisasi, pembagian tugas dan tanggung jawab, serta adanya prosedur operasional standar, kemungkinan besar sudah terbentuk dan berfungsi. Hasil ini mencerminkan bahwa meskipun terdapat beberapa aspek yang telah berjalan optimal, masih diperlukan perbaikan terutama dalam aspek kolaborasi lintas pihak, pemanfaatan potensi ekonomi hutan, serta dukungan infrastruktur dan pendanaan. Evaluasi ini penting untuk memperkuat peran KPH sebagai ujung tombak pengelolaan hutan berkelanjutan di tingkat daerah.

**Kata kunci :** KPH, Pengelolaan Hutan, Kinerja.

**How to Cite:** Fitrianingsih., Ichan, A. C., & Valentino, N. (2025). Analisis Kinerja Pengelolaan Hutan Pada Balai KPH Toffo Pajo Soromandi . *Journal of Authentic Research*, 4(2), 1405–1414. <https://doi.org/10.36312/jar.v4i2.3577>



<https://doi.org/10.36312/jar.v4i2.3577>

Copyright© 2025, Fitrianingsih et al.

This is an open-access article under the CC-BY-SA License.



## PENDAHULUAN

Secara umum hutan dapat di artikan sebagai suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang berisikan sumber daya alam hayati yang di dominasi oleh pepohonan satu dengan yang lainnya, yang tidak dapat di pisahkan.( Tampongangoy., 2022) Sedangkan kehutanan secara luas dapat mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan pengelolaan hutan secara berkelanjutan (Ago et al.,

2018., Tanjung *et al.*, 2019). Mengingat Kekayaan alam yang tentunya tidak dapat dinilai jumlahnya ini, tersebar di seluruh Indonesia salah satunya yang berada di kabupaten Dompu. yang memiliki bentang alam yang cukup beragam, diantaranya meliputi pegunungan, savana, laut, dan lainnya. Akan tetapi, bentang alam tersebut tidak diimbangi dengan perlindungan alam yang berkelanjutan sehingga mengakibatkan kondisi bentang alam yang rusak. Hal ini disebabkan oleh penggunaan kawasan hutan yang berlebihan, seperti perambahan hutan dan pertambangan ilegal yang tentunya akan dapat merusak ekosistem hutan.

Permasalahan tersebut merupakan sebagian kecil yang terjadi di wilayah hutan yang ada di Indonesia. Oleh karena itu pemerintah Indonesia menetapkan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di tingkat tapak yang bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang lestari dan efisien untuk memperbaiki sistem pengelolaan hutan. Prayitno, (2021); Fitria *et al.*, 2021 menegaskan bahwa KPH, yang berperan sebagai pengelola langsung kawasan hutan, diharapkan dapat mengatasi berbagai masalah untuk dapat mencapai tujuan pengelolaan hutan yang berkelanjutan selain itu KPH bukan hanya sebagai yang mengelola hutan di tingkat tapak saja melainkan elemen kunci yang secara mendasar menjalankan dan mewujudkan kebijakan kehutanan di Indonesia. Dalam hal mewujudkan pengelolaan hutan yang lestari dan efisien, praktek pengelolaan hutan di mulai dari penetapan wilayah hutan di tingkat tapak hingga identifikasi dan inventarisasi sumber daya hutan di wilayah tingkat tapak tersebut sering kali terhambat oleh permasalahan sengketa lahan, konflik kepemilikan lahan dengan masyarakat adat, dan keterbatasan sumber daya untuk dapat melakukan inventarisasi hutan secara akurat, menyebabkan keberhasilan pengelolaan hutan terganggu dan berdampak pada pengambilan keputusan dan pengambilan kebijakan yang kurang tepat, serta lemahnya penegakan hukum, sehingga Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) harus memperkuat peran dalam menjaga keberlanjutan kawasan hutan. (Wulandari *et al.*, 2022) mengatakan bahwa terhambatnya peran KPH sebagai garda terdepan dalam pengelolaan hutan lestari disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat yang mengubah kawasan hutan secara ekologis menjadi pemanfaatan hutan secara ekonomi. Dari permasalahan yang terjadi perlu adanya analisis kinerja KPH untuk dapat mengetahui bagaimana peran kinerja KPH Toffo Pajo soromandi dalam pengelolaan hutan dan seperti apa upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kinerja KPH Toffo Pajo soromandi dalam pengelolaan hutan.

## METODE

Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei sampai bulan Juni di Balai KPH Toffo Pajo Soromandi dengan menggunakan Metode Deskriptif. Penelitian deskriptif dilakukan agar dapat mengetahui nilai masing-masing variabel, baik itu satu variabel saja maupun lebih, analisis deskriptif juga biasa dilakukan dengan tujuan utama agar dapat memberikan gambaran atau penjelasan terkait suatu kondisi apa adanya (Adiwisastro *et al.*, 2020; Tino *et al.*, 2021). penelitian deskriptif bersifat independen tanpa membuat perbandingan. Untuk dapat memperoleh data penelitian, peneliti mewawancarai 2 responden yaitu bapak Isa Immanuel Anshari S.Hut selaku staf ahli kebijakan di Balai KPH Toffo Pajo dan bapak Ahmad Rifai selaku kepala seksi perencanaan, pemanfaatan hutan dan pemberdayaan masyarakat pada KPH Toffo Pajo Soromandi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data

sekunder, untuk teknik pengumpulan data menggunakan metode studi dokumen, observasi dan wawancara, Untuk tahapan pengolahan data terdiri dari tabulasi data dan analisis data berdasarkan temuan lapangan. Penelitian ini mengacu pada panduan analisis penilaian kinerja pembangunan dan pelaksanaan pengelolaan hutan pada wilayah kesatuan pengelolaan hutan di provinsi nusa tenggara barat. Indeks penilaian kinerja pembangunan kph dapat dikategorikan menjadi tiga kelas yaitu tinggi, sedang dan rendah, setiap elemen akan di berik nilai bobot seperti pada Tabel 1.

Tabel 1. Kategorisasi Bobot Penilaian Kinerja KPH

Uraian	Skor
Bila data lapangan memenuhi seluruh unsur yang tertuang dalam elemen kualitas	3
Bila data lapangan hanya memenuhi sebagian unsur yang tertuang dalam elemen kualitas	2
Bila data lapangan tidak memenuhi seluruh unsur yang tertuang dalam elemen kualitas	1

Kemudian untuk menganalisis data dalam peneilaian ini, metode yang di gunakan adalah perhitungan rata-rata yang dilakukan dalam dua tahap sebagai berikut:

1. Menentukan rata-rata dalam satu indikator dapat dihitung dengan menjumlah nilai/skor hasil penilaian dalam setiap elemen kualitas yang berada dalam satu indikator kemudian dibagi dengan jumlah seluruh elemen kualitas yang terdapat dalam satu indikator:

$$\frac{\text{jumlah skor dari masing masing elemen kualitas}}{\text{jumlah seluruh elemen kualitas pada suatu indikator}}$$

2. Menentukan hasil akhir penilaian dapat dilakukan dengan menghitung jumlah nilai/skor rata-rata hasil penilaiandalam setiap kriteria dibagi dengan jumlah seluruh kriteria yang digunakan dalam proses penilaian:

$$\frac{\text{jumlah skor dari masing – masing kriteria}}{\text{jumlah seluruh kriteritia yang di gunakan}}$$

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesatuan Pengelolaan Hutan Toffo Pajo Soromandi merupakan KPH yang menggabungkan 2 Unit yaitu (Unit XIX) dan (Unit XIV) yang secara Administrasi berada di Kabupaten Dompu dan Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat. Luas Hutan Lindung (HL) seluas 33.717 Ha; Hutan Produksi seluas 3.917 Ha; dan Hutan Produksi terbatas (HPT) 6.365 Ha.

Tabel 2 Hasil analisis penilaian kinerja KPH

No	Kriteria	Nilai indeks	Kategori
1.	kelembagaan pengelolaan hutan	2,54	Tinggi
2.	Tata Hutan dan rencana pengelolaan Hutan	2,8	Tinggi
3.	Tata Hutan dan rencana pengelolaan Hutan	1,95	Sedang
4.	Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam	2,85	Tinggi
5.	Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan	2,54	Tinggi
6.	Pemberdayaan	2,62	Tinggi
7.	Peran serta masyarakat	2,33	Sedang
8.	Kerjasama	1	Rendah
9.	Monitoring dan evaluasi	1,8	Sedang
10.	System informasi kehutanan	2	Sedang
11.	Pembinaan dan pengawasan	1,7	Sedang
12.	Pendanaan	1,75	Sedang
13.	Sarana dan prasarana	2	Sedang

Sumber hasil analisis data primer

### **Kelembagaan Pengelolaan Hutan**

kelembagaan bisa di sebut dengan lembaga yang tinggi yang di dalamnya terdapat perilaku dan struktur yang setara kedudukannya dan dapat di sebut sebagai organisasi.(Sukwika, 2018; Arini et al.,2020) Seperti pada tabel di atas Hasil penilaian dengan kriteria kelembagaan pengelolaan hutan sebesar 2,54 menempatkan Balai KPH Toffo Pajo Soromandi dapat dikategori tinggi , angka ini menunjukan bahwa secara umum, seperti struktur organisasi, pembagian tugas dan tanggung jawab, serta adanya prosedur operasional standar, kemungkinan besar sudah terbentuk dan berfungsi.

### **Tata Hutan dan Rencana Pengelolaan Hutan**

Dari hasil analisis data menunjukan, bahwasannya kriteria Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan kawasan Hutan di peroleh nilai indeks sebesar 1,95 dengan kategori sedang, hal ini dapat menunjukan bahwa pemanfaatan dan penggunaan pada kawasan KPH Toffo Pajo belum secara optimal, tetapi juga tidak bisa dikatakan berada pada kondisi yang rendah, hasil ini dapat mengindikasikan sebagian besar potensi yang berada pada kawasan Hutan telah di gunakan, namun hal ini masih memiliki ruang untuk dilakukannya peningkatan baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pemanfaatannya. Dari hasil wawancara di temukan hal yang dapat menyebabkan kriteria Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan kawasan Hutan dikategorikan menjadi sedang yakni: a.

1. Kurangnya pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) seperti Madu, Bambu, Rotan dll.
2. Belum optimalnya kerjasama baik itu dari masyarakat atau pihak ketiga dalam kawasan hutan.
3. Adanya keterbatasan akses, infrastruktur, dan kurang nya SDM dari masyarakat dalam .pengelolaan hutan.

### **Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam**

Dari hasil wawancara dengan menggunakan kusioner di peroleh Nilai indeks **2,85** dengan kriteria Perlindungan Hutan dan konservasi alam, dapat menunjukkan bahwa upaya yang di lakukan oleh pihak KPH dalam perlindungan hutan dan konservasi alam yang dilakukan berada pada tingkat yang baik atau optimal. ini termasuk dalam kategori tinggi, yang berarti kegiatan kegiatan yang di lakukan oleh pihak KPH berjalan meski tidak sepenuhnya berhasil, meskipun nilai indeks 2,85 tergolong kedalam kategori tinggi namun belum mencapai skor maksimal artinya masih banyak ruang untuk dapat memperbaiki lagi seperti melakukan penguatan kapasitas kelembagaan KPH, penambahan personil penyuluh kehutanan, peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan konservasi dan rehabilitasi serta pengawasan yang keberlanjutan.

### **Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan**

Nilai indeks 2,54 dengan kriteria Rehabilitasi dan reklamasi hutan menunjukkan bahwa kegiatan rehabilitasi dan reklamasi kawasan hutan dalam wilayah kerja Balai KPH Toffo Pajo telah dilakukan dengan baik dan memberikan dampak yang cukup signifikan. Kategori tinggi menandakan bahwa upaya pemulihan kondisi hutan dari kerusakan atau degradasi sudah berada di jalur yang benar, meskipun belum sepenuhnya optimal, dalam hal pelaksanaannya mengalami beberapa permasalahan seperti bibit yang di berikan tidak sepenuhnya di tanam, atau tidak di pelihara dengan baik oleh masyarakat yang mengelolaa kawasan hutan menurut (Khalik, 2019) kegiatan rehabilitasi dan reklamasi hutan menggunakan metode partisipatif dengan tujuan agar dapat mengembangkan potensi dan bisa memberdayakan masyarakat secara langsung, kegiatan rehabilitasi dilakukan dengan cara rehabilitasi dan penghijauan kembali, untuk tingkat keberhasilannya di tentukan langsung oleh masyarakat itu sendiri.

### **Pemberdayaan**

kegiatan pemberdayaan ini dapat di katakana berhasil apabila masyarakatnya berpartisipasi secara langsung pada kegiatan yang sudah terencana. Hasil analisis data yang di peroleh dari wawancara menggunakan kusioner penelitian dengan kriteria pemberdayaan mendapatkan skor 2,62 menandakan bahwa sebagian besar indikator pemberdayaan berada dalam kondisi optimal atau mendekati ideal. Hal ini menunjukkan bahwa program pemberdayaan tidak hanya dilaksanakan, tetapi juga relevan, Nilai indeks 2,62 dapat menunjukan bahwa program pemberdayaan masyarakat dapat di lakukan secara efektif dan berdampak nyata meski tidak sepenuhnya optimal. Dari hal tersebut masyarakat tidak hanya dapat memperoleh manfaat ekonomi saja melainkan juga dapat menjadi mitra aktif dalam pelestarian hutan.

### **Peran Serta Masyarakat**

Menurut (Runggandini, 2018) dalam pengelolaan hutan peran serta masyarakat di butuhkan dalam pengelolaan kawasan hutan konservasi. Peran serta masyarakat dapat diartikan sebagai suatu langkah nyata penghubung antara masyarakat dengan pemerintah terkait suatu kebijakan lewat komunikasi Nilai indeks dari kriteria peran serta masyarakat di peroleh sebesar 2,33 dengan kategori sedang ini, dapat menunjukan bahwa keterlibatan masyarakat baik itu secara langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan hutan sudah terlihat dari adanya nilai tersebut, namun sampai saat ini hal tersebut belum secara merata, konsisten dan optimal untuk dilakukan. meskipun seringkali ada inisiatif serta

partisipasi dari masyarakat itu sendiri. Kategori sedang ini menunjukkan bahwa ada program atau kegiatan yang melibatkan masyarakat namun belum menyentuh seluruh lapisan atau kelompok masyarakat dalam kegiatan kegiatan yang di selenggarakan

### **Kerjasama**

Menurut Harsoono *et al.* (2019); Agustina *et al.* (2019) Kerjasama adalah sebuah tatatanan pekerjaan yang dapat di kerjakan oleh dua orang atau lebih supaya dapat memenuhi tujuan. Kerjasam atau kolaborasi dalam sebuah tim dapat membantu mempermudah mewujudkan sebuah keberhasilan yang nyata, untuk itu ktiteria kerjasama ini sangat di perlukan dalam mengetahui kinerja kph. Pada kriteria kerja sama dengan nilai indeks sebesar 1,00 dikategorikan kedalam kelas rendah, hal ini di picu oleh aspek kolaborasi dan Kemitraan pengelolaan Hutan masih terbilang lemah, atau dengan kata lain belum berjalan secara optimal. perlu adanya ;

- a. Inisiatif untuk membangun kolaborasi pada lintas sektor
- b. Di lakukan perbaikan komunikasi dan transparasi oleh kedua belak pihak
- c. Serta membangun kelembagaan kerjasama yang kuat dan berkelanjutan.

### **Monitoring dan Evaluasi**

berdasarkan hasil wawancara dengan kriteria monitoring dan evaluasi di peroleh nilai indeks sebesar 1,8 nilai ini dapat di kategorikan kedalam kelas sedang karena monitoring dan evaluasi merupakan salah satu proses penting dalam kegiatan kehutanan tujuan nya adalah untuk dapat menilai sejauh mana program yang di rencanakan berjalan lancar, melacak kemajuan kegiatan yang di selenggarakan, jika di temukan hasil yang kurang oktimal maka bisa langsung menyusun langkah perbaikan serta menjadi dasar agar dapat melakukan pengambilan keputusan untuk kegiatan berikutnya.

### **Sistem Informasi Kehutanan**

Nilai indeks 2,00 menunjukkan bahwa sistem informasi kehutanan sudah ada dan tersedia namun dalam hal ini masih belum secara optimal di pergunakan karena beberapa keterbatasan di antaranya adalah beberapa data yang bersifat privasi yang tidak boleh di akses oleh masyarakat, dengan adanya penilaian ini menjadi dasar yang kuat untuk di kembangkan, namun perlu adanya penguatan kapasitas, dan kolaborasi agar dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan informasi kehutanan.

### **Pembinaan dan Pengawasan**

Seperti dalam tabel hasil analisis kinerja KPH pada poin 11 dengan kriteria pembinaan dan pengawasan memperoleh nilai indeks sebesar 1,7 dengan kategori sedang kegiatan pembinaan, pemanfaatan serta kegiate lainnya sudah di lakukan tetapi belum secara optimal, perlu adanya peningkatan dalam SDM, kualitas dan cakupan yang lebih meluas dari data tersebut sudah membuktikan bahwa perlu adanya penguatan agar lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

### **Pendanaan**

Pendanaan merupakan salah satu hal terpenting dalam pengelolaan hutan yang lestari menurut Bahrin *et al.*,2020 ketentuan pendanaan berfokus pada penentuan dari mana dana akan di peroleh dan dalam bentuk seperti apa dana tersebut akan di gunakan. Jika dana tidak mencukupi seluruh rencana kegiatan maka akan berpengaruh pada hasil akhir dari sebuah kinerja. Kriteria pendanaa dengan nilai indeks sebesar 1,75 dengan kategori sedang menunjukkan bahwa kriteria pendanaan dalam konteks kehutanan mengacu pada dukungan keuangan dalam pelaksanaan

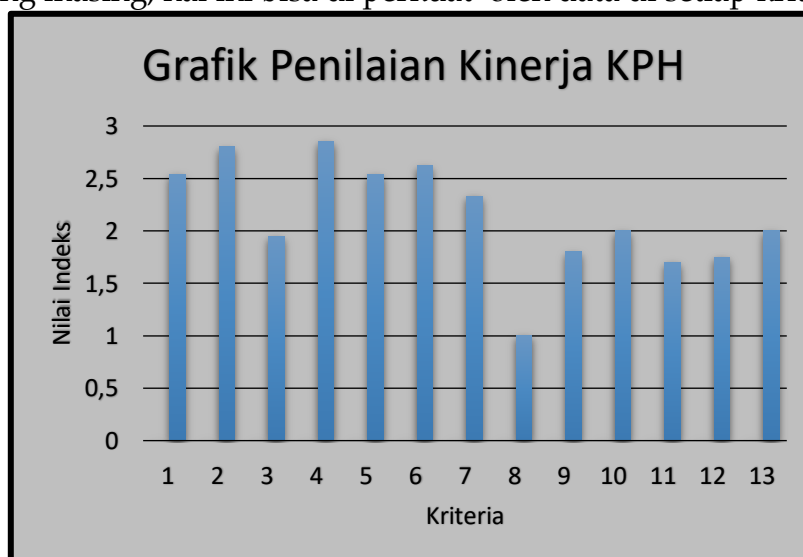
program seperti kegiatan kegiatan perlindungan dan konservasi SDA, kegiatan rehabilitasi dan perhutanan sosial, serta investasi kehutanan di kategorikan menunjukkan bahwa dana yang tersedia kurang mendukung atau kurang memadai jika digunakan pada seluruh kegiatan yang ada, itu artinya bahwa program penudaan sudah ada namun belum berfungsi secara optimal.

### Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan keseluruhan peralatan serta perlengkapandan fasilitas kerja yang dapat berfungsi sebagai penunjang utama atau pembantu dalam mendukung pekerjaan dan pelaksanaan kepentingan Paleeleu *et al.*, (2022). Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai bukan hanya tentang pemenuhan aset fisik. Keberhasilannya juga ditentukan oleh pengelolaan yang terstruktur, termasuk bagaimana aset tersebut diorganisir, didistribusikan, dan dikelola secara berkelanjutan Lestari *et al.*, (2023). dengan nilai indeks sebesar 2,00 ini menunjukkan bahwa sarana dan prasarana di KPH Toffo Pajo sudah tersedia namun belum sepenuhnya memadai atau masih kurang merata dalam mendukung kegiatan pengelolaan hutan secara optimal. tersedianya peralatan ini masih terbatas jumlahnya sehingga tidak bisa digunakan secara merata oleh semua petugas. Kemudian perlu adanya penguatan dan pembaruan agar oprasional di lapangan dapat berjalan lebih efisien dan profesional

### Hasil Akhir Penilaian

jumlah skor masing masing kriteria di bagi dengan seluruh kriteria yang di gunakan. Dalam hasil wawancara menggunakan kusioner dengan jumlah pertanyaan sebanyak 86 di bagi ke dalam 13 kriteria sesuai dengan panduan Penilaian Kinerja pembangunan dan Pelaksanaan Pengelolaan Hutan pada Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan di Provinsi NTB. di peroleh nilai indeks sebesar 2,14 dengan katerori sedang, hal ini di pengaruhi oleh hasil akhir dari perhitungan kriteria yang berbeda beda, seperti pada pembahasan di atas bahwa setiap kriteria memiliki skornya masing masing, hal ini bisa di perkuat oleh data di setiap kriterianya.



Gambar 1. Grafik perhitungan kinerja KPH

Hasil penelitian ini dapat menunjukkan bahwa aspek penilaian kinerja pengelolaan hutan pada wilayah KPH Toffo Pajo dengan menggunakan, 44 indikator dan 86 elemen kualitas yang terbagi kedalam 13 kriteria sesuai dengan buku panduan penilaian kinerja pembangunan dan pelaksanaan pengelolaan hutan pada wilayah kesatuan hutan di provinsi Nusa Tenggara Barat. Hal ini berkaitan dengan

peran hutan dalam menjaga keseimbangan ekologi yang berdampak pada iklim dunia, seperti fenomena pemanasan global yang dapat mengancam keselamatan manusia. Pada dasarnya instansi yang bertanggung jawab atas perlindungan hutan adalah instansi kehutanan di tingkat daerah. (Arba et al., 2023) yang dalam hal ini KPH Toffo Pajo selaku instansi pengelolaan hutan di tingkat tapak sudah berupaya dalam melakukan perlindungan hutan dan konservasi alam.

Seperti yang terlihat pada tabel grafik di atas menunjukkan skor tertinggi diperoleh oleh kriteria perlindungan hutan dan konservasi alam dengan nilai indeks sebesar 2,85 dapat dikategorikan ke dalam kelas tinggi hal ini disebabkan oleh upaya-upaya yang dilakukan KPH Toffo Pajo sudah dilakukan sesuai dengan prosedur yang sesuai dengan peraturan daerah no 14 tahun 2019 tentang pengelolaan hutan di NTB. seperti patroli hutan, patroli gabungan, penanganan hutan partisipatif dan penjagaan, penyelidikan dan pemeliharaan barang bukti dll.

Untuk skor terendah diperoleh oleh kriteria ke 8 yaitu kerja sama dengan dilai indeks 1. Menurut (Yeny et al., 2018) keberhasilan dalam hal pengelolaan hutan sangat bergantung pada keterlibatan pihak lain dalam pengelolaan hutan atau kegiatan yang direncanakan. dari hasil wawancara dengan pihak KPH, dapat disimpulkan dari hasil analisis data skor lemah dari semua kriteria yang ada adalah kerjasama, hal ini disebabkan oleh kurangnya kerjasama baik dari pihak provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan hutan, seperti pada kegiatan tata hutan dan perencanaan, rehabilitasi dan deklamsi, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, penanganan konflik pemberdayaan masyarakat dan perlindungan hutan serta konservasi, kegiatan-kegiatan ini seharusnya menjadi ajang sekaligus mempererat hubungan kerjasama antara kedua pihak atau lebih dalam pengelolaan kawasan hutan. (Nikoyan et al., 2020) mengatakan bahwa jika ingin melakukan pelaksanaan hutan secara menyeluruh perlu adanya kerjasama dengan pemerintah daerah. Hal inilah yang dapat memperkuat kinerja KPH dalam pengelolaan hutan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data kinerja pengelolaan hutan pada Balai KPH Toffo Pajo Soromandi diperoleh beberapa kesimpulan ;

1. Hasil analisis kinerja KPH Toffo Pajo berada di kategori sedang dengan memperoleh nilai indeks sebesar 2,14 Nilai indeks tersebut dipengaruhi oleh hasil akhir perhitungan dari semua kriteria, Kinerja tinggi ini didorong oleh upaya KPH Toffo Pajo yang telah sesuai dengan Prosedur dan Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2019,
2. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan narasumber, upaya yang sudah dilakukan KPH Toffo Pajo dalam meningkatkan kinerja adalah dengan melakukan kegiatan seperti patroli hutan, patroli gabungan, penanganan hutan partisipatif, penjagaan, dan penyelidikan barang bukti.

## REFERENSI

Ago, M. Z. C., Herawatiningsih, R., & Yani, A. (2018). TINGKAT DOMINANSI DAN ASOSIASI KELOMPOK KAYU INDAH DI AREAL IUPHHK-HTI PT. BHATARA ALAM LESTARI KABUPATEN MEMPAAWAH (Dominance Levels And Associations Kayu Indah Grup In the Area of IUPHHK-HTI PT. Bhatara



- Alam Lestari Mempawah District). *Jurnal Hutan Lestari*, 6(3), 438–446.
- Adiwisastro, M. F., Muhajir, H., & Supriadi, D. 2020. Pengukuran kesenjangan digital menggunakan metode deskriptif berbasis website. *Evolusi: Jurnal sains dan manajemen*, 8(2).
- Arini, Gusti Ayu, and Taufiq Chaidir. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Kerja Penduduk Lanjut Usia Di Kabupaten Lombok Barat." *Journal of Economics and Business* 6.1 (2020): 47-68.
- Arba, Sudiarto, & Yuniansari, R. (2023). Perlindungan Hutan dan Fungsinya Bagi Kehidupan Manusia dan Lingkungan Alam. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 8(2), 127–142. <https://doi.org/10.29303/jkh.v8i2.144>
- Agustina, Indah, Ali Mutaufiq, and Taryanto Taryanto. "Pengaruh Kerjasama Tim dan Komunikasi Terhadap Kinerja Karyawan di PT. Samick Indonesia." *Jurnal Tadbir Peradaban* 4.1 (2024): 7-17.
- BAHRUN, Muhammad Fadly; TIFAH, Tifah; FIRMANSYAH, Amrie. Pengaruh keputusan pendanaan, keputusan investasi, kebijakan dividen, dan arus kas bebas terhadap nilai perusahaan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 2020, 8.3: 263-276.
- Fitria, Wira, Didik Suharjito, and Sulistya Ekawati. "Peran Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Dalam Implementasi Perhutanan Sosial: Studi di KPH Produksi Kerinci, Provinsi Jambi dan KPH Lindung Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat." *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan* 18.2 (2021): 145-160.
- Harsoono, Z. A. R., Hertanto, M. I., Barisfallah, T. D., Dharm, R. A., Ramadhanty, D., Pambudi, H. D., & Puspa, T. (2019, October). Review perkembangan riset topik kerjasama tim selama sepuluh tahun terakhir pada jurnal online. In *Prosiding Seminar Nasional Cendekiawan* (pp. 2-22).
- Khalik, A. (2019). Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Dan Reklamasi Hutan Di Kabupaten Mamuju. *MITZAL (Demokrasi, Komunikasi dan Budaya) : Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi*, 2(2). <https://doi.org/10.35329/mitzal.v2i2.278>
- Lestari, D., Pratama, R. A. A., & Anggraeni, S. D. (2023). Pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. *Dharma Acariya Nusantara: Jurnal Pendidikan, Bahasa Dan Budaya*, 1(1), 101-113.
- Nikoyan, A., Kasim, S., Uslinawaty, Z., & Yani, R. (2020). Peran dan Manfaat Kelembagaan Kelompok Tani Pelestari Hutan Dalam Pengelolaan Taman Hutan Raya Nipa-Nipa. *Perennial*, 16(1), 2020. <http://dx.doi.org/10.24259/perennial.v16i1.8972>
- Prayitno, D. E., & Ichsan, A. C. (2021). Problematika Hukum Kesatuan Pengelolaan Hutan Di Indonesia. *Jurnal Belantara*, 4(1), 75–88. <https://doi.org/10.29303/jbl.v4i1.754>
- Pelealu, R. R., Nayoan, H., & Sampe, S. (2022). Pengaruh sarana dan prasarana terhadap efektivitas kerja pegawai pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *GOVERNANCE*, 2(2).
- Runggandini, C. W. M. (2018). Asosiasi Pengajar Hukum Adat ( Apha ) Indonesia. *Journal of Indonesian Adat Law (Jial)*, Volume 2 N, 68–69.
- Sukwika, T. (2018). Analisis Aktor dalam Perumusan Model Kelembagaan Pengembangan Hutan Rakyat di Kabupaten Bogor. *Journal of Regional and Rural*

- Development Planning*, 2(2), 133. <https://doi.org/10.29244/jp2wd.2018.2.2.133-150>
- Tino, Reyhan, Hayati Hayati, and Shandy Pieter Pelamonia. "Analisis Deskriptif Kekuatan Otot Peras Tangan." *Jurnal Porkes* 4.1 (2021): 32-38.
- Tanjung, Albert. "Kedudukan hutan adat di atas tanah ulayat dalam pemanfaatan hutan." *Populis: Jurnal Sosial dan Humaniora* 4.1 (2019): 137-148.
- Tampongangoy, Rahel. "Penegakan hukum terhadap pelaku pembukaan lahan dengan membakar hutan." *Lex Administratum* 10.3 (2022).
- Wulandari, C., Bakri, S., Safe'i, R., Hilmanto, R., Pah, J. M., & Pangestu, P. (2022). Training for Strengthening the Human Resources Capacity Overcoming the Socio-Economic Impact on Social Forestry Farmers Due to the Covid-19 Pandemic at Pesawaran FMU, Lampung. *Repong Damar: Jurnal Pengabdian Kehutanan dan Lingkungan*, 1(2), 136. <https://doi.org/10.23960/rdj.v1i2.6241>
- Yeny, I., Agustarini, R., & Heryati, Y. (2018). Analisis para pihak dalam kerja sama pengembangan hasil hutan bukan kayu di kabupaten pasaman barat. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 15(2), 143-164.